



# Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru

Ratu Devina\*, Fajriani Ananda

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3015>

\*Correspondence: Ratu Devina

Email:

[ratu.devina2465@student.unri.ac.id](mailto:ratu.devina2465@student.unri.ac.id)

Received: d18-10-2025

Accepted: 21-11-2025

Published: 11-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru menimbulkan tantangan serius seperti laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata, serta meningkatnya angka kemiskinan akibat bonus demografi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Bangga Kencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan keluarga berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Bangga Kencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan kunci dari BKKBN Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, PLKB, serta masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Namun, masih terdapat kendala signifikan seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Kesimpulannya, meskipun program telah diimplementasikan secara menyeluruh, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan literasi masyarakat terhadap program, serta sinergi lintas sektor. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola dan strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengendalian penduduk, agar program Bangga Kencana dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan keseimbangan demografis di wilayah perkotaan khususnya kota pekanbaru.

**Kata Kunci:** Implementasi, Implementasi Kebijakan, Program Bangga Kencana.

## Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melaporkan jumlah penduduk sebanyak 282. 477. 584 orang di paruh pertama tahun 2024. Selanjutnya, lebih dari setengah populasi Indonesia tinggal di area kota. Salah satu faktor penyebab fenomena ini adalah urbanisasi yang berlangsung dengan cepat (Ilham, 2024). Berdasarkan Buku Statistik Indonesia 2024 yang dirilis oleh BPS, Provinsi Riau 56 37 23 31

menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dengan total 6. 728. 100 jiwa, atau 2,39% dari keseluruhan populasi. Peningkatan populasi ini memberikan tantangan besar dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam pengelolaan layanan publik terhadap masyarakat (BPS Statistics Indonesia, 2024).

Kota Pekanbaru, yang merupakan pusat dari Provinsi Riau, telah mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Pekanbaru mencapai 1,14 juta orang. Informasi terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus meningkat. Selama lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) di wilayah ini adalah 0,38%. Peningkatan ini lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan sebelumnya yang mencapai 2,07% dalam lima tahun sebelumnya. (Darmawan, 2025).

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju pertumbuhan penduduk
		pertahun 2020-2024 (%)
2020	983.356	0,89
2021	994.585	1,53
2022	1.007.540	1,30
2023	1.123.348	2,99
2024	1.167.600	3,23

Sumber: (BPS Kota Pekanbaru, 2024)

Data jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebesar 983.356 jiwa, terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 1.167.600 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di Pekanbaru tidak hanya dipicu oleh tingginya angka kelahiran, tetapi juga oleh banyaknya orang yang datang ke kota ini untuk berbagai alasan, seperti melanjutkan studi di perguruan tinggi atau melakukan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengacu pada kondisi di mana peningkatan jumlah penduduk terjadi lebih cepat dari pada kemampuan pemerintah dan lingkungan dalam menyediakan sumber daya yang memadai (Puspita Sari dkk., 2023). Dampak dari kondisi ini dapat meluas ke berbagai sektor, sehingga dalam hal ini kependudukan sangat berpengaruh besar terhadap komposisi, distribusi dan tingkat 21 21 35 24 51 9 perkembangan penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang dimaksud dengan kependudukan merujuk pada faktor jumlah, struktur, perkembangan, distribusi, pergerakan, penyebaran, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan aspek Politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan setempat. Selain itu, dijelaskan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas hidup individu dalam segala aspek. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa tujuan dari pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap teratur dan seimbang.

Melihat jumlah penduduknya yang terus bertambah, Kota Pekanbaru tentu akan menghadapi tantangan tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah satunya adalah yaitu kepadatan penduduk, hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya masalah kependudukan dan persebaran penduduk yang belum merata. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Pekanbaru terkonsentrasi di Kecamatan Tuahmadani sebanyak 161,13 ribu jiwa, Sementara populasi terkecil di kecamatan Sail sebanyak 25,999 ribu jiwa (BPS Kota Pekanbaru, 2024).

Dapat dilihat pada Tabel 2, data kepadatan penduduk di beberapa kecamatan, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara kecamatan yang padat dan yang kurang padat. Persentase penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Tuahmadani, Marpoyan Damai, dan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Di sisi lain, Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Payung Sekaki	99.589	2.801
Tuahmadani	161.132	5.400
Binawidya	80.132	2.190
Bukit Raya	107.347	4.868
Marpoyan Damai	150.313	5.054
Tenayan Raya	116.014	1.014
Kulim	57.603	1.013
Limapuluh	45.021	11.144
Sail	25.999	7.975
Pekanbaru Kota	26.744	11.834
Sukajadi	48.026	12.773
Senapelan	38.390	5.773
Rumbai	102.207	1.652
Rumbai Barat	29.205	340
Rumbai Timur	35.626	258
<b>Pekanbaru</b>	<b>1.123.348</b>	<b>1.780</b>

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024

Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, BKKBN meluncurkan program yang disebut "Bangga Kencana" (Program Pengembangan Keluarga dan Keluarga Berencana). Program ini merupakan penyederhanaan dari nama sebelumnya, "Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga" (KKBPK), yang pada tahun 2020 diubah menjadi "Bangga Kencana" untuk menyederhanakan. Program Bangga Kencana adalah inisiatif keluarga berencana yang mencakup semua tahapan kehidupan, termasuk kehamilan, Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Program ini mencakup kelompok kegiatan seperti, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA dan PIK-R. Program yang menyeluruh ini merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya keluarga dan mengurangi angka pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru.

BKKBN sepenuhnya mendukung arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020–2024 untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya terkait upaya "pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan manajemen kependudukan." Untuk memastikan dukungan BKKBN, diperlukan metrik keberhasilan untuk seluruh program dan kegiatan prioritas yang telah terlaksana. Renstra BKKBN 2020–2024 menetapkan beberapa tujuan strategis:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need*
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun  
Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam implementasi program Bangga Kencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan di dua instansi utama, yaitu BKKBN Provinsi Riau dan Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, yang masing-masing berperan sebagai pelaksana program di tingkat provinsi dan kota. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria seperti partisipasi langsung atau pemahaman mendalam tentang implementasi program. Informan terdiri dari pejabat struktural di BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk, ketua DPC IPeKB (PLKB) Kota Pekanbaru, PPKBD di kelurahan aktif program, serta masyarakat penerima dan bukan penerima program. Pemilihan informan ini bertujuan untuk menggali perspektif dari sisi perencana, pelaksana, dan penerima manfaat program secara seimbang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

## **Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga kencana) dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Berdasarkan indikator Warwick dalam (Kadji, 2015), pelaksanaan program mencerminkan adanya upaya struktural pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan, layanan kontrasepsi, dan pemberdayaan keluarga. Namun, di sisi lain, efektivitas pelaksanaan program masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya literasi masyarakat, dan belum meratanya pengawasan pelaksanaan program di tingkat kelurahan.

Dari sisi kemampuan organisasi, pada prinsipnya kemampuan organisasi dibahas berdasarkan kemampuan teknis, koordinasi dan SOP. Perangkat pelaksana seperti Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan BKKBN telah memiliki struktur operasional yang jelas, tetapi pelaksanaan program masih tergantung pada jumlah dan kapasitas petugas lapangan/PLKB yang terbatas. Kelemahan teknis dalam organisasi pelaksana dapat menghambat efektivitas kebijakan publik. Keterbatasan tenaga kader dan penyuluh mengakibatkan kegiatan sosialisasi dan pemantauan program tidak menjangkau seluruh sasaran secara merata. Kemudian, koordinasi berjalan baik melalui mekanisme formal seperti Rakorda, Reviu Program, dan Radalgram, serta lintas sektor dengan kelurahan, puskesmas, dan OPD terkait, yang memastikan keselarasan program dari pusat hingga lapangan. Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan pada layanan teknis seperti pelayanan KB, tetapi kegiatan kelompok bersifat fleksibel dan disesuaikan oleh kader.

Pada aspek informasi, peneliti menemukan bahwa sosialisasi kebijakan bagi pelaksana Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru dilakukan melalui forum formal seperti Rakorda untuk menyamakan persepsi antar wilayah. Sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaksana program memanfaatkan media sosial pribadi (seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*) serta penyuluhan langsung oleh penyuluh KB. Edukasi juga dilakukan secara *door-to-door* oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) kepada kelompok sasaran. Sosialisasi dilakukan secara fleksibel dan adaptif, baik formal maupun informal, untuk menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Dari segi dukungan, Pelaksanaan Program Bangga Kencana didukung oleh berbagai elemen kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan penting di lapangan. Keberadaan PPKBD dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak di tingkat kelurahan serta PKB/PLKB sebagai pelaksana teknis program menjadi fondasi utama dalam menyampaikan informasi, mendampingi masyarakat, serta mengkoordinasikan kegiatan di wilayah binaan. Mereka bekerja sama dengan kader dan petugas kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran program, seperti keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan pasangan usia subur, mendapatkan pelayanan dan edukasi yang sesuai. Dukungan juga datang dari tenaga kesehatan seperti bidan desa/kelurahan yang memberikan pelayanan langsung terkait kesehatan reproduksi dan KB. Selain itu, keberadaan kelompok kegiatan seperti

BKB, BKR, dan BKL turut memperkuat pelaksanaan program melalui pendekatan pembinaan keluarga berdasarkan kelompok usia. Posyandu juga menjadi wadah penting yang dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung melalui pelayanan dasar kesehatan dan penyuluhan. Sinergi antara semua unsur ini membentuk ekosistem kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan program. Seluruh aktor lapangan, termasuk kader yang berasal dari lingkungan masyarakat sendiri seperti istri RT/RW, menjadikan pelaksanaan program lebih efektif karena dekat dengan warga dan memahami kondisi sosial setempat. Peran aktif mereka memperkuat jalannya sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan program Bangga Kencana. Dukungan kelembagaan dan keterlibatan lintas sektor ini menjadi faktor kunci dalam mendukung upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Terakhir dalam indikator pembagian potensi, peneliti menemukan bahwa implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan cukup baik. Struktur birokrasi telah disederhanakan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih lincah dan responsif. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara penyuluh KB dan Dinas Dalduk KB juga telah diatur secara fungsional dan yuridis. Selain itu, adanya pengawasan berkala dan pelaporan rutin melalui aplikasi SIGA memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Semua ini menunjukkan bahwa pembagian potensi secara internal telah menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Bangga Kencana

## **Faktor penghambat Implementasi Program Bangga Kencana dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru**

### **1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang**

Keterbatasan jumlah penyuluh KB menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Program Bangga Kencana. Ketidakseimbangan antara jumlah SDM dengan cakupan wilayah kerja menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan pendampingan kepada sasaran program. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan dan pemerataan tenaga penyuluh agar upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

### **2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Permasalahan kurangnya partisipasi menjadi hambatan dalam implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru. Masyarakat masih banyak yang memiliki persepsi negatif atau keliru terhadap program KB, terutama karena faktor keyakinan agama, budaya, dan minimnya edukasi yang berkelanjutan. Peran tokoh lingkungan seperti RT/RW juga sangat menentukan keberhasilan sosialisasi, karena tanpa dukungan mereka, partisipasi masyarakat dalam kegiatan program cenderung rendah. Kegiatan sosialisasi juga belum mampu menarik minat masyarakat secara luas karena tidak disertai insentif langsung, yang menyebabkan keengganan untuk terlibat.

### **3. Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Dana yang diterima daerah sangat tergantung pada kebijakan pusat dan jumlahnya tidak menentu, sehingga sulit untuk merancang program jangka panjang secara efektif. Akibatnya, banyak kegiatan hanya dilaksanakan secara swadaya oleh kader atau petugas lapangan, dengan dana operasional yang sangat minim. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti untuk kegiatan yang dilakukan pada wilayah kecamatan, sumber dana kegiatan operasional yaitu berasal dari APBN dan swadaya. Penggunaan dana berasal dari pelatihan-pelatihan penting pun lebih sering dilakukan secara daring, yang tidak seefektif pelatihan langsung di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di tingkat akar rumput.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan melalui berbagai kegiatan utama namun belum secara maksimal, dapat dilihat dari indikator kemampuan organisasi, program ini dilaksanakan oleh instansi yang memiliki struktur dan tugas yang jelas, namun program ini masih menghadapi keterbatasan dalam jumlah SDM pelaksana. Dari aspek informasi sudah cukup baik, program telah menyediakan berbagai media informasi dan penyuluhan. Dalam hal dukungan, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sementara dari segi pembagian potensi, peran dan tugas antar pelaksana telah terbagi dengan cukup baik dan jelas. Program ini berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa implementasi program masih belum sepenuhnya optimal.
2. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini, yaitu kurangnya Jumlah SDM (Penyuluh KB/PLKB) yang menyebabkan beban kerja menumpuk dan menjangkau wilayah secara tidak merata. Kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, agar pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal, diantaranya:

1. Diharapkan untuk melakukan penguatan sumber daya manusia dan analisis beban kerja. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Dalduk KB dan BKKBN perlu menambah jumlah PKB/PLKB, khususnya di wilayah yang memiliki cakupan keluarga besar.
2. Kemudian, Pelatihan dan pembinaan rutin bagi kader untuk melakukan sosialisasi perlu dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi program kepada masyarakat.

3. Serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar kegiatan program dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

### Referensi

- Andani, G. Y., & Putri, N. E. (2024). Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9999–10004.
- Andriani, R. P. (2021). Implementasi Promosi Progam Bangga Kencana Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Kepedulian Masyarakat Di Bkkbn Provinsi Jawa Timur [Thesis (Skripsi), Universitas Bhayangkara Surabaya]. <https://doi.org/http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1295>
- Azzahra, S. S., & Sundari, M. (2022). Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 564–572. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7302345>
- BKKBN. (2023). Rangkuman Materi Program Bangga Kencana.
- BPS Kota Pekanbaru. (Diakses: 2025, Februari 28). Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024. <https://pekanbarukota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/0e92e9d9c971131ee3ea3a54/kota-pekanbaru-dalam-angka-2024.html>
- BPS Statistics Indonesia. (2024). *Statistical Yearbook of Indonesia 2024 (Vol. 52)*. Badan Pusat Statistik.
- Darmawan, A. D. (Diakses: 2025, Februari 5). Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 1,14 Juta Jiwa Data per 2024. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Dewi, Y. ., & Hidir, A. . (2022). Keluarga Berencana Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12415–12422. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10488>
- Dwi Ananda A. (2024). Strategi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Pada Kebijakan Program Bangga Kencana Dalam Menekan Angka Unmet Need Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/80406>
- Halimah, N. (2024). Implementasi Program Tuntas Iqra' Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Alqur'an Di Smp Negeri 8 Yogyakarta [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/dspace.uui.ac.id/123456789/52906>

- Hayati, E. (2024). Kajian Implementasi Program Zero Waste Dalam Membentuk Literasi Lingkungan Di Mts N 1 Lampung Barat [Uin Raden Intan Lampung.]. <https://doi.org/https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/32246>
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 4 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i4.2852>
- Ilham, M. (Diakses: 2024, April 20). *Dinamika Kependudukan di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Perencanaan Pembangunan*.
- Ilmu, J., Publik, A., Apriyanto, D., Poltitik, I., Tanjungpura, U., Universitas, P., Pontianak, T., Administrasi, I., & Universitas, P. (2021). Implementasi program kampung keluarga berencana di desa angan tembawang dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 7–8.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG PRESS.
- Kurniawan, W., & Maani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Merrynce, A. H., & Hidir, A. (2013). Efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 1-118.
- Nono, C. A., & Suraji. (2024). Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Proses Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur [IPDN]. <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17453>
- Odjiviana, N. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014 [FISIP UMY]. <https://doi.org/http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16742>
- Pertiwaningsih, N. A., & Dedy, K. U. (2023). Implementasi Program Balai Latihan Kerja pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Nomor 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Puspita Sari, A., Rahmadini, G., Carlina, H., Irsan Ramadan, M., & Egi Pradani, Z. (2023). Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia. Dalam *Journal of Economic Education* (Vol. 2, Nomor 1). <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>

- 
- Puspita Sari, A., Rahmadini, G., Carlina, H., Irsan Ramadan, M., & Egi Pradani, Z. (2023). Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia. Dalam *Journal of Economic Education* (Vol. 2, Nomor 1). <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>
- Putri, Z. N. (2021). Peran Humas Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Bangga Kencana. <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59262>
- Ramadhani, N. D., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Smart Inclusive School (SIS). *Public Policy*, 4(2). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Utomo, A., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana Keluarga Berencana Di Kecamatan Genuk Kota Semarang. [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)
- Watik, D., Novitasari, F., & Trisiana, D. A. (2022). Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v6i1.6853>